

## Daftar Pustaka

- Azikin Solthan. 2009. *Dinamika Politik Daerah dalam Kebijakan Penyusunan APBD Pasca Pilkada Langsung*. Yogyakarta: Ombak.
- Budiarjo, Miriam. 1991. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- David Marsh, Gerry Stocker. 2010. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Irtanto. 2008. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ida Bagoes Mantra. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance*. Surabaya: Insan cendekia.
- Keller, Suzanne. 1984. *Penguasa dan Kelompok Elite*. Jakarta: CV Rajawali.
- Lisa Horissn. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Perdana Group
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Cetakan Keenam.
- Sarundajang. 2012. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Siti Aminah. 2014. *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Kencana
- Sabatier Paul, Jenkin-smith Hank. 1999. *Policy Change and Learning*.

### Media Online

<http://dprdkutaikartanegara.go.id/bacacatatan.php?id=4>. Dikutip pada tanggal 5 Desember 2016. Pada pukul 3.21.

<https://corettoni.wordpress.com/2015/02/11/petunjuk-untuk-kerangka-advokasi-koalisi-acf/>. Dikutip pada tanggal 10 Desember 2016. Pada pukul 9.50.

<sup>1</sup> <https://kanalntb.com/dana-aspirasi-anggota-dprd-kota-mataram-naik-rp-17-m-gus-ari-jarang-dewan-berani-terbuka-soal-ini/>

Website KPU Kota Mataram. <https://jdih.kpu.go.id/ntb/detailkepkud-2189> disunting pada 16 januari 2020.

<https://www.facebook.com/kpumataramkota/posts/daftar-calon-tetap-dct-dprd-kota-mataram-pemilihan-umum-tahun-2019/1927594934207229/>

<https://mataramnews.co.id/16780/awal-agustus-dilantik-ini-daftar-calon-terpilih-anggota-dprd-kota-mataram/> disunting pada 15 januari 2020 pukul 12.01 wib.

### Daftar Regulasi

1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.
3. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2012, tentang Dana Hibah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 23 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016